

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adnan Buyung Nasution, *Pikiran & Gagasan Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: Kompas, 2010).
- Anak Agung, "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, *Jurnal Pandecta*", <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/13933>.
- Eni Lestari, Garmien Mellia, *Peran Kpu Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019*, *Jurnal Tata Kelola Pemilu Batch IV*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.
- Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Right In Democratiche Rechtsstaat)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014).
- Hendry B Mayo, *An Introduction to Democratic Theory* (Oxford University Press, 1965).
- Jimly Assididqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", [trial::http://www.docudesk.com](http://www.docudesk.com).
- Juan J. Linz and Alfred Stepan, *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Belajar Dari Kekeliruan Negara-Negara Lain* (Bandung: Mizan, 2001).
- Julita Widya Dwintari, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA) Volume 5 Nomor 1 (2021) 29 - 51*
- Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, *Visi Misi KPU kota Metro*, <https://kota-metro.kpu.go.id/page/read/33/visi-misi>.
- Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Hak politik suatu negara sebuah perbandingan konstitus*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Sejarah Kementrian Hukum dan HAM*, <https://www.kemenkumham.go.id/profil/tentang-kemenkumham-ri/sejarah-kemenkumham-ri>.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Rencana Strategis Kantor Wilayah Tahun 2020–2024*, jabar.kemenkumham.go.id.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Visi Misi Dan Tata Nilai Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, <https://jateng.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-dan-tata-nilai>.
- KPU, *Sejarah KPU*, <https://www.kpumojoekertokab.go.id/page/read/32/sejarah-kpu>.
- Ladju Kusmawardi, Suteki Suteki, And Aprista Ristyawati, 'Penerapan Sanksi Administratif Dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara Di Pengadilan

Tata Usaha Negara Semarang', Law Reform, 2018
<https://doi.org/10.14710/Lr.V14i1.20240>.

Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore at London: The John Hopkins University Press, 1999).

Mukhti Fajar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi* (Malang: Setara Press, 2013).

Moh. Mahfud MD., *Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta, Disampaikan dalam Sidang Disertasi, Universitas Gajah Mada, 1993).

Retno Kistianti, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", <https://www.neliti.com/id/publications/43199/sejarah-perlindungan-hak-hak-asasi-manusia-dalam-kaitannya-dengan-konsepsi-negar>.

Rhoda E. Howard, *Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, (Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2000).

Rhona K Smith et al, *Hukum HAM*, (Yogyakarta, Pusham UII , 2009).
<https://doi.org/10.24002/jep.v34i2.1668>.

Sabungan Sibarani, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Salah Tangkap (Studi Kasus Putusan NO. 2161K/PID/2012)", *Justitia et Pax*, 2019,

Sarana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), *Catatan Atas Sejumlah Cacat Pemilu 2014*, <https://www.sigab.or.id/id/article/catatan-atas-sejumlah-cacatpemilu-2014>.

Samuel Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (Jakarta: Grafiti, 2001),

Sri Hastuti P, "Pemilu dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu", <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/5014>.

Unit Kegiatan Pers Indonesia KRONIKA, SLB Tetap Berprestasi, <http://kronika.id/slb-tetap-bereprestasi/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2023, pukul 10:50 Wib.

Zainudin ali M.A, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2011).

PERATURAN :

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tentang Hak Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Peraturan KPU Nomor. 35 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Dan Kabupaten/Kota.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014

1 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

LAIN-LAIN :

General Comment No. 5 Mengenai Orang-Orang Cacat, E/C.12/1994/13 yang diadopsi oleh CESCR pada sidang yang ke 38 pada tanggal 25 November 1994, sebagaimana dikutip oleh Pranoto Iskandar.

Virginia Atkinson dkk, (2017), Disability Rights and Election Observation: Increasing Access to the Political Process, Nordic Journal of Human Rights, Volume 35 Nomor 4, Taylor & Francis Group: USA.